

PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KEMANDIRIAN SUATU LEMBAGA DAN ORGANISASI

Oleh M.Munandar Sulaeman¹

Pengantar

Dewasa ini masalah kemandirian suatu lembaga atau organisasi menjadi penting karena sering terjadi organisasi atau lembaga kecil “dimakan” oleh lembaga atau organisasi yang besar, sehingga tidak berkuat, tidak berdaya menghadapi kekuatan yang besar tersebut, padahal mungkin organisasi atau lembaga kecil tersebut sebagai underbaou dari yang besar. Hal ini terjadi kerana tidak jelasnya visi dan misi atau program dan kegiatan dari organisasi atau lembaga tersebut. Kalau demikian yang terjadi maka organisasi atau lembaga tersebut menjadi terkatung-katung tidak ada kegiatan (daek hayu henteu kajen).

Pengertian Lembaga dan Organisasi

Agar ada pengertian dan pehaman yang sama, maka perlu dibatsi pengertian pokok tentang apa itu lembaga atau organisasi. Lembaga berbeda dengan organisasi, lembaga (institution) adalah wadah kegiatan atau sebagai wahana saluran aspirasi, kehendak dan sekaligus alat atau instrumen untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, maka suatu institusi memiliki berbagai komposisi dan fungsi seperti dijelaskan oleh Chitambar (1972) yaitu :

- Material tujuan budaya
- Prasarana partisipasi aktif bagi anggota
- Pedoman bertindak dan berfikir
- Berfungsi merealisasikan kebutuhan dasar
- Mempunyai struktur seperangkat norma dari harapan dan jaringan peran,
- Mempunyai fungsi menifes dan laten,
- Mempunyai peran besar dalam pengawasan sosial dan individual
- Mempunyai banyak fungsi (amalgamasi)
- Mempunyai beberapa unsur sebagai komposisi lembaga
- Mempunyai efek fungsi positif dan negatif, sebagai sarana untuk mengefektifkan kegiatan.

¹ Makalah pada acara workshop Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender Tingkat Kota Bandung 2008, Pemkot Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, 21 Agustus 2008, Hotel Kirana Bandung

Jadi lembaga pengertiannya lebih umum untuk suatu wadah atau wahana yang terjadi di masyarakat, misalnya lembaga agama, lembaga pendidikan (termasuk pesantren), lembaga adat, lembaga perkawinan, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga social dan lainnya. Secara fungsional lembaga diartikan sebagai suatu system norma, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan kegiatan pokok manusia untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting

Sedangkan organisasi social (social organization) dapat diartikan sebagai kata kerja yaitu proses membagi para anggota masyarakat ke dalam kelompok-kelompok atau asosiasi asosiasi beserta pengembangan tatacara, pola-pola dan perilaku tetapnya yang mereka ciptakan. Sehingga kelompok tersebut diartikan sekumpulan orang yang memiliki *kesadaran bersama* keanggotaannya dan *saling berinteraksi*. Organisasi dalam arti kata benda terbaginya anggota masyarakat ke dalam kelompok beserta tata cara tetap yang mereka ciptakan.

Kalau dibandingkan antara lembaga dan organisasi tampak perbedaannya sebagai berikut :

Lembaga	Organisasi
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Orientasi pada Kebutuhan ➤ Peranan Yang diamanikan ➤ Upacara ➤ Pengawasan Sosial ➤ Pengakuan karena Membudaya ➤ Terlibatnya Pendukung ➤ Tradisi Turun Temurun ➤ Empiri ➤ Berpegang pada Norma ➤ Prioritas Usia dan Gengsi ➤ Sifat Memenuhi Kebutuhan Tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> • Orientasi tujuan • Tugas yang dilaksanakan • Prosedur • Pengawasan Peraturan • Pengakuan karena didirikan resmi • Kebiasaan karena rutin • Digagas dan wujudkan • Kesetiaan dan ikatan pada tujuan • Prioritas keterampilan dan kemampuan • Alat mencapai tujuan tertentu

Sumber: Sediono Tjondronegoro, 1982. Dalam Gejala Organisasi

Menuju Kemandirian Lembaga dan Organisasi

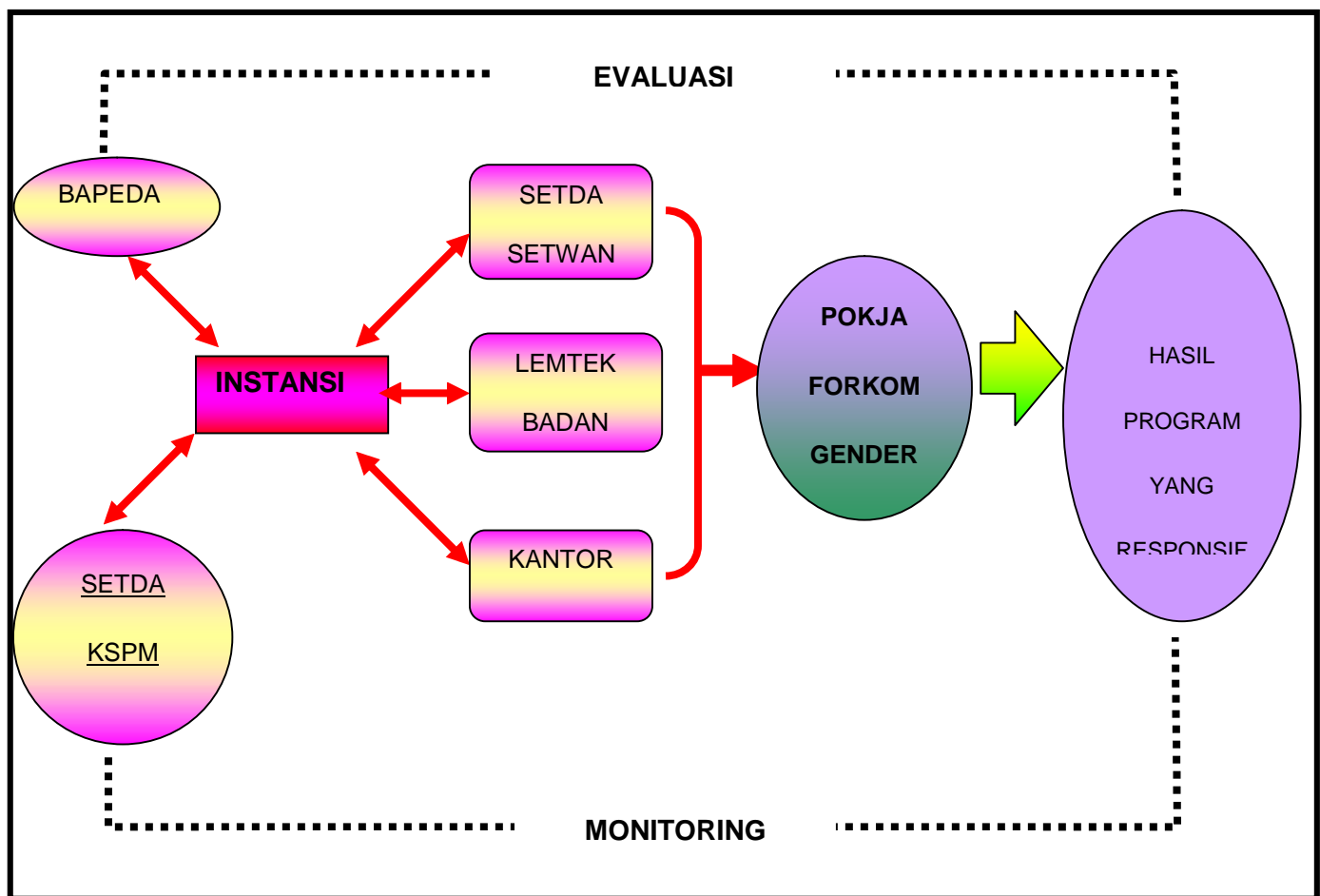
Secara substansial yang dinamakan lembaga dan organisasi seharusnya mandiri, karena keduanya sudah mempunyai orientasi nilai, peran dan tugas yang jelas. Namun dalam prakteknya tidak demikian karena berbenturan dengan kepentingan dan berlaku system hirarki dan kentalnya birokrasi. Suatu organisasi akan mandiri apabila mempunyai sikap independen, tidak terbelenggu oleh berbagai kekuatan yang mengganggu kemandirian. Arti kemandirian bagi sebuah organisasi adalah jelasnya visi, misi, program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi.

Forkom Gender sebagai organisasi mandiri, berarti Forkom Gender adalah sebagai kelompok atau forum yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi serta Mekanisme Kerja yang jelas, yang

Berkesadaran Bersama dan Saling Berinteraksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Demikian pula Tujuan, Sasaran dan Keluaran yang akan dicapainya jelas. Dengan demikian agenda yang perlu dipersiapkan untuk suatu organisasi adalah menyusun :

- a. Visi dan Misi
- b. Nilai dan Prinsip Organisasi
- c. Tugas Pokok dan Fungsi
- d. Mekanisme Kerja
- e. Tujuan, Sasaran dan Keluaran

Contoh mekanisme kerja sebuah Forkom Gender di salah satu kabupaten



Gambar 2 (B). Mekanisme Kerja Pokja PKKG Tingkat Kabupaten

BAHAN DISKUSI KELOMPOK III:

KOMISI PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KEMANDIRIAN LEMBAGA DAN ORGANISASI

TUPOKSI FORKOM GENDER (Keputusan Walikota no.260/Kep 555-Huk/2007/3 Sept 2007)

KOMISI PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KEMANDIRIAN LEMBAGA DAN ORGANISASI

a. *Menyusun rencana operasional kegiatan* tentang implementasi kebijakan pemerintah kota Bandung di bidang Pemberdayaan Perempuan khususnya tentang Peningkatan Kemampuan dan Kemandirian Lembaga Organisasi Perempuan

b. *Menyelenggarakan koordinasi, komunikasi, serta layanan fasilitas* di bidang Pemberdayaan Perempuan khususnya tentang Peningkatan Kemampuan dan Kemandirian Lembaga Organisasi Perempuan

c. *Melaksanakan sosialisasi* tentang Peningkatan Kemampuan dan Kemandirian Lembaga Organisasi Perempuan.

d. *Melaksanakan evaluasi dan pelaporan* pelaksanaan tugas tentang Peningkatan Kemampuan dan Kemandirian Lembaga Organisasi Perempuan

Tugas Pertama

1. Memilih Ketua Komisi
2. Memahami Tupoksi dan Materi Substansi di Masing-Masing Komisi
3. Teridentifikasi PUG dan Anak di lembaga masing-masing anggota Forkom Gender
4. Terencananya Kegiatan PUG dan Anak di lembaga masing-masing anggota Forkom Gender

Tugas Kedua

Menyusun Rencana Kegiatan dengan mengisi kolom

No	Kegiatan	Hasil Yang diharapkan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan Triwulan....	Sumber Biaya APBN/APBD?DLL	Keterangan
1						
2						

Forum Komunikasi Konsultasi dan Koordinasi Gender Kota Bandung

Keputusan Walikota Bandung

NOMOR : 260/Kep 555-Huk/2007

- ❖ Satuan kerja non struktural yang berfungsi sebagai forum untuk mensinkronisasikan pelaksanaan PUG. Forum ini beranggotakan para *Gender Focal Point* dalam lingkup SKPD, Kepolisian, Rumah Sakit, Perguruan Tinggi, Organisasi Masa dan LSM.

- ❖ Forkom Ini perlu dibentuk sebagai langkah strategis dan konkrit untuk mendorong kesetaraan dan keadilan gender dalam rangka mewujudkan pembangunan pemberdayaan perempuan

- ❖ Dalam Fokom ini dibentuk tiga komisi terdiri dari :
 - **Komisi Kesetaraan dan Keadlian Gender**
 - Komisi Tindak Kekerasan Dan Perdagangan Terhadap perempuan dan Anak
 - Komisi Peningkatan Kemampuan dan kemandirian Organisasi Perempuan

